



Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Human Development Index

Dhian Puteri Widodo*, Sri Isnawati

Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Stikubank, Semarang
Jl. Tri Lomba Juang, Mugassari, Kec. Semarang Sel., Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Email: ^{1,*}dhianputeri7009@mhs.unisbank.ac.id, ²isnowati@edu.unisbank.ac.id

Email Penulis Korespondensi: dhianputeri7009@mhs.unisbank.ac.id

Submitted: 01/01/2025; Accepted: 05/02/2025; Published: 05/02/2025

Abstrak—Studi ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif melalui human development index pada Provinsi Jawa Tengah. Terdapat 35 kabupaten/kota yang menjadi sample dengan periode selama lima tahun, yaitu tahun 2018-2023. Pada Studi ini kinerja keuangan diukur dengan kemandirian keuangan daerah, efektivitas keuangan daerah, dan harmonisasi pengeluaran daerah, sementara Pembangunan Ekonomi inklusif diukur menggunakan IPEI. Studi ini dilakukan dengan uji regresi dengan pendekatan random effect dan analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan berupa derajat desentralisasi fiskal, harmonisasi belanja daerah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pembangunan inklusif dan HDI. Sementara itu efektifitas PAD memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pembangunan inklusif namun berpengaruh signifikan negative terhadap HDI. Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa HDI berperan signifikan sebagai variabel mediasi antara DDF, EFE, BO, dan BM terhadap IPEI. HDI memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IPEI dengan p-value 0.000, yang menunjukkan bahwa peningkatan HDI mendorong pembangunan ekonomi inklusif. Secara tidak langsung, DDF, BO, dan BM juga menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap IPEI melalui HDI, dengan p-value masing-masing 0.000, 0.000, dan 0.0032. Namun, EFE menunjukkan hubungan negatif signifikan terhadap IPEI melalui HDI, dengan p-value 0.000, yang mengindikasikan perlunya pengelolaan PAD yang lebih efektif untuk mendukung pembangunan manusia.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah; IPEI; Ekonomi Inklusif; Human Development Index; Regresi Linear Berganda

Abstract—This study aims to examine the effect of financial performance on inclusive economic growth through the human development index in Central Java Province. There are 35 districts / cities that are sampled with a period of five years, namely 2018-2023. In this study, financial performance is measured by regional financial independence, regional financial effectiveness, and harmonization of regional expenditures, while inclusive economic development is measured using the IPEI. This study was conducted with regression tests with a random effect approach and path analysis. The results show that financial performance in the form of the degree of fiscal decentralization, harmonization of regional expenditure has a significant positive influence on inclusive development and HDI. Meanwhile, the effectiveness of PAD has a significant positive effect on inclusive development but a significant negative effect on HDI. The results of path analysis show that HDI plays a significant mediating role between DDF, EFE, BO, and BM in relation to IPEI. HDI has a significant positive effect on IPEI with a p-value of 0.000, indicating that an increase in HDI promotes inclusive economic development. Indirectly, DDF, BO, and BM also show significant positive effects on IPEI through HDI, with p-values of 0.000, 0.000, and 0.0032 respectively. However, EFE shows a significant negative relationship with IPEI through HDI, with a p-value of 0.000, indicating the need for more effective management of PAD to support human development.

Keywords: Regional Financial Performance; IPEI; Inclusive Economy; Human Development Index; Multiple Linear Regression

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan sebagai provinsi terbaik pertama perihal Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (Humas Jateng, 2024). Pada hakikatnya, pembangunan daerah ini tidak lepas dari pengaruh pembangunan ekonomi inklusif yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah (Hapsari, 2019). Penelitian Prasetyantoko et al. (2012) menjelaskan konsep pembangunan ekonomi inklusif ditujukan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Kesejahteraan masyarakat terukur dari turunnya angka pengangguran, ketimpangan dan kemiskinan, serta pemerataan akses pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Namun demikian, masih terdapat dilema antara strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi terhadap hasil pembangunan yang merata. Arsyad (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan dan pemerataan adalah dua sisi strategi pembangunan yang bertentangan satu sama lain (trade-off). Dengan kata lain, elemen pemerataan cenderung "mengorbankan" aspek perekonomian yang diinginkan, dan sebaliknya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini terlihat pola pertumbuhan Jawa Tengah yang selalu menunjukkan tren perekonomian positif di tengah tantangan dan ketidakpastian perekonomian nasional (DJPb Jateng, 2023). Data statistik resmi pada BPS (2024) menunjukkan bahwa Jawa Tengah memberikan kontribusi sebesar 14,49% terhadap perekonomian di Pulau Jawa, dengan pertumbuhan ekonomi spasial Pulau Jawa sebesar 4,96%. Capaian ekonomi Jawa Tengah mampu tumbuh di atas rata-rata dari capaian Pulau Jawa sebesar 4,98% (cumulative-to-cumulative). Namun Jawa Tengah memiliki persentase penduduk miskin yang lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional meskipun terdapat tren perbaikan dari tahun ke tahun (10,77% Jawa Tengah dan nasional sebesar 9,36% tahun 2023). Hal ini diperparah dengan kondisi ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah yang terlihat pada angka rasio gini yang masih berada di atas target



(0,369%). Keberhasilan pencapaian perekonomian Provinsi Jawa Tengah ini belum maksimal dikarenakan kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin dan garis kemiskinan yang cukup besar (DJPb Jateng, 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi inklusif belum sepenuhnya terjadi di Jawa Tengah, terutama di kabupaten dan kota. Perlu adanya peran pemerintah terkait arah kebijakan pengelolaan anggaran yang efektif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan indikator yang lebih komprehensif (Safitri, 2021).

Indikator lain yang mengukur keberhasilan pembangunan daerah adalah Human Development Index (HDI). Perkembangan HDI Jawa Tengah terus mengalami kemajuan dan terjadi pada semua aspek, antara lain kualitas kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Hal ini terlihat pada data BPS (2024) yang menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki capaian HDI sebesar 73,39, meningkat sebesar 0,59 poin atau 0,81% dari HDI tahun 2022 sebesar 72,79. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya meningkatkan HDI melalui kebijakan daerah pada penyelenggaraan pendidikan secara luas, pembangunan kesehatan, serta kualitas pembangunan perempuan dan anak (Humas Jateng, 2024)

Dalam upaya keberhasilan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan alokasi anggaran secara efektif dan efisien dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian Masduki et al. (2020) menjelaskan bahwa kemampuan pengelolaan keuangan yang dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mana pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan daerah. Menurut Dali et al. (2021), tingkat pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat tercermin dari performa kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan daerah penting untuk mendorong kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, memperkuat efektivitas dan efisiensi dalam realisasi PAD (Widiyanto & Isnowati, 2023). Salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah adalah dengan menganalisis rasio keuangan yang berasal dari anggaran yang telah ditetapkan dan dijalankan (Gousario & Dharmastuti, 2015).

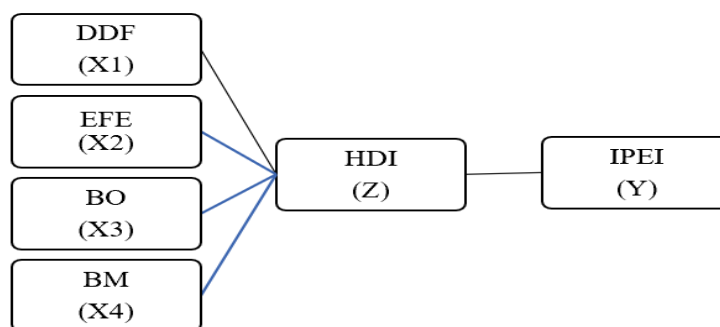
Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya dampak positif dari kualitas pemerintahan yang diindikasikan oleh kondisi fiskal dan kinerja laporan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif (Prasetyia, 2021). Penelitian serupa yang dilakukan oleh Azwandi et al. (2022) juga menunjukkan hasil bahwa rasio kemandirian, rasio derajat desentralisasi fiskal, serta rasio efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan Human Development Index. Berbeda dengan penelitian yang menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi namun berpengaruh positif terhadap Human Development Index. Selain itu dijelaskan pula bahwa rasio efektivitas PAD memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi namun tidak berpengaruh terhadap Human Development Index.

Masih terdapat perbedaan hasil dari penelitian terdahulu perihal hubungan antara kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi inklusif dan Human Development Index. Hasil penelitian bervariasi di berbagai lokasi karena kondisi sosial ekonomi, jangka waktu yang digunakan dan berbagai metodologi penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan perbedaan dan mengembangkan kembali hasil dari penelitian sebelumnya dengan menganalisis bagaimana faktor-faktor tersebut saling memengaruhi dalam konteks pembangunan daerah. Analisis yang lebih mendalam mengenai hubungan antara variabel diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang signifikan bagi para pengambil keputusan ketika merancang pendekatan yang lebih optimal untuk meningkatkan pembangunan daerah.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Kerangka Dasar Penelitian

Berikut Gambar 1 merupakan kerangka koseptual dari penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Gambar 1 menyajikan beberapa variabel yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar faktor yang mempengaruhi pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Variabel Independen terdiri dari X1 = DDF (Derajat Desentralisasi Fiskal), yang menjadi tolak ukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah dalam mengelola PAD, X2 = EFE (Efektivitas Pendapatan Asli Daerah) yang menunjukkan keberhasilan kinerja pemerintah dalam mencapai target, X3 = BO (Belanja Operasional) mencakup pengeluaran yang ditujukan untuk operasional pemerintah, X4 =



BM (Belanja Modal) menunjukkan pengeluaran untuk investasi dalam infrastruktur dan fasilitas publik. Variabel Z, yakni HDI (Human Development Indeks), berfungsi sebagai variabel mediasi yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Variabel Dependen, Variabel Y yakni IPEI (Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) menunjukkan inklusivitas pembangunan secara keseluruhan. Melalui analisis hubungan antar variabel, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor tersebut saling memengaruhi dalam konteks pembangunan daerah. Melalui hal tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang signifikan bagi para pengambil keputusan ketika merancang pendekatan yang lebih optimal untuk meningkatkan pembangunan daerah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena data pada penelitian ini terdiri dari angka-angka dan analisis statistik. Penelitian menggunakan jenis data sekunder. Data yang digunakan adalah data panel, terdiri dari cross section yaitu 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dan time series periode 2018-2023. Pemilihan rentang waktu 2018-2023 dalam penelitian ini disesuaikan dengan rentang waktu RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023. Pengumpulan data keuangan daerah, IPEI, serta HDI didapatkan dari sumber-sumber relevan pada website Badan Pusat Statistika Jawa Tengah (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPJK), BPKAD Provinsi Jawa Tengah dan Bappenas. Tabel 1 menyajikan definisi operasional dalam penelitian:

Tabel 1. Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Skala
1.	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI)	IPEI mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan.	Skala 1-3 kurang memuaskan Skala 4-7 memuaskan Skala 8-10 sangat memuaskan
2.	Human Development Index	HDI menjelaskan kualitas penduduk dapat mengakses hasil pembangunan yang dibentuk dari tiga dimensi dasar yaitu Angka Harapan Hidup, Pendidikan, dan Standar Hidup Layak.	< 60 rendah <60 HDI <70, sedang 70 < HDI < 80, tinggi 80, sangat tinggi
3.	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal	Tolak ukur dalam menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola PAD guna penyelenggaraan otonomi daerah $DDF = \frac{PAD}{TOTAL\ PAD}$	0,00-10,00%, sangat kurang 10,01%-20,00%, kurang 20,01-30,00%, sedang 30,01-40,00%, cukup 40,01-50,00%, baik >50,00% sangat baik
4.	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	Ukuran keberhasilan kinerja suatu pemerintah dalam mencapai target penerimaan pendapatan asli daerah yang ditelah ditetapkan $EFE = \frac{Realisasi\ PAD}{Target\ PAD}$	>100%, sangat efektif 90%-100%, efektif 80%-90%, cukup efektif 70%-80%, kurang efektif 0%-60%, tidak efektif
5.	Rasio Harmonisasi Pengeluaran Daerah	Tingkat optimalnya alokasi dana yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk belanja operasi maupun belanja modal. $BO = \frac{Total\ Belanja\ Operasi}{Total\ Belanja}$ $BM = \frac{Total\ Belanja\ Modal}{Total\ Belanja}$	

Pengolahan data pada studi ini menggunakan metode analisis jalur (Path Analysis) dengan memanfaatkan software Eviews. Pada penelitian ini menggunakan model data panel dikarenakan data yang digunakan termasuk ke dalam data time series yaitu lima tahun dimulai pada tahun 2018 hingga 2023 dan data cross section yaitu Kab/Kota di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hipotesis dan variabel yang telah ditentukan maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\text{Model I HDI} = \alpha_1 + \beta_1.1DES + \beta_2.1EFE + \beta_3.1BEL + \rho \tag{1}$$

$$\text{Model II IPEI} = \alpha_2 + \beta_1.2DES + \beta_2.2EFE + \beta_3.2BEL + \beta_4.2HDI + \rho \tag{2}$$

Keterangan:

Sistem persamaan di atas menunjukkan dua model regresi yang saling berkaitan. Model pertama menjelaskan tentang Indeks Pembangunan Manusia (HDI) yang dipengaruhi oleh tiga variabel independen yaitu Kinerja Keuangan berupa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DES), Kinerja Keuangan berupa Rasio Efektivitas PAD (EFE), dan Kinerja Keuangan berupa Rasio Harmonisasi Belanja Daerah (BEL). Dalam model ini, α_1 merupakan konstanta atau nilai



intersep, sedangkan $\beta_{1.1}$, $\beta_{2.1}$, dan $\beta_{3.1}$ adalah koefisien regresi yang menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap HDI. Sementara ρ merepresentasikan error term atau kesalahan pengukuran dalam model. Selanjutnya untuk model kedua menjelaskan tentang Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI) yang dipengaruhi oleh empat variabel independen, yaitu DDF, EFE, BEL, dan HDI. Dalam model ini, α_2 adalah konstanta, sedangkan $\beta_{1.2}$, $\beta_{2.2}$, $\beta_{3.2}$, dan $\beta_{4.2}$ merupakan koefisien regresi yang menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel terhadap IPEI. Sedangkan untuk ρ menunjukkan error term. Spesifikasi sistem persamaan simultan ini memungkinkan analisis efek langsung maupun tidak langsung dari variabel-variabel eksogen terhadap IPEI melalui mediasi HDI.

2.2 Pemilihan Model Data Panel

Pemilihan model dalam regresi data panel melibatkan tiga langkah utama: uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM). Uji Chow menguji model terbaik antara Fixed Effect Model (FEM) dengan Common Effect Model (CEM), apabila cross section $F > 0,05$ (nilai signifikan) maka model yang sesuai adalah CEM, begitu sebaliknya. Uji Hausman menguji model terbaik antara fixed effect model (FEM) atau random effect model (REM), jika nilai cross section random > 0.05 maka model yang sesuai adalah REM, begitu sebaliknya. Uji LM menguji model yang sesuai untuk random effect model (REM) dengan common effect model (CEM), jika nilai cross section Breusch-pagan > 0.05 , maka model yang sesuai adalah CEM, begitu sebaliknya.

2.3 Pengujian Asumsi Klasik

Pada penelitian ini juga melakukan uji asumsi klasik sebelum pengujian hipotesis guna mengkaji kelayakan model dalam riset Uji asumsi klasik yang digunakan mencakup pengujian normalitas menggunakan jarque-bera (JB), pengujian heteroskedasitas menggunakan Likelihood Ratio (LR) Test, pengujian Multikolinearitas, serta pengujian autokolerasi menggunakan statistic Durbin-Watson (DW);

2.4 Pengujian Hipotesis

Setelah menemukan pilihan model terbaik yang sesuai dengan asumsi klasik, berikutnya adalah tahap pengecekan tingkat signifikansi. Dalam penelitian ini, pengujian signifikansi dilakukan sesuai dengan Tabel 2 meliputi:

Tabel 2. Uji Signifikansi

Uji Signifikansi	Hipotesis Nol	Hipotesis Alternatif	Tolak H0
Uji t	Semua variabel independen tidak berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen	Semua variabel independen berpengaruh secara individual terhadap variabel dependen	p-value < 0.05
Uji f	Semua variabel independen tidak memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen;	Minimal satu variabel independen memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen;	p-value < 0.05
Uji R-Squared	$R^2 > 0,05$		

2.5 Analisis Jalur

Analisis jalur dipergunakan untuk menguraikan pola hubungan seperangkat variabel independen terhadap variabel dependen sehingga mengetahui pengaruh langsung atau tidak langsung (Riduwan & Kuncoro, 2017). Pengujian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tingkat intensitas variabel Human Development Index sebagai variabel mediasi dalam mempengaruhi kinerja keuangan berupa rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, dan rasio harmonisasi belanja daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif sebagai variabel dependen secara tidak langsung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran awal mengenai data yang digunakan dalam penelitian ini berupa nilai rata-rata (mean), median, nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, skewness (kemiringan distribusi), dan kurtosis (keruncingan distribusi).

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif	DDF	EFE	BO	BM	HDI	IPEI
Mean	0.196	1.094	0.864	0.136	73.114	5.767
Median	0.176	1.074	0.87	0.13	71.985	5.74
Maximum	0.53	1.747	0.947	0.273	84.99	7.71
Minimum	0.105	0.722	0.727	0.053	66.11	4.83



Statistik Deskriptif	DDF	EFE	BO	BM	HDI	IPEI
Std. Dev.	0.074	0.175	0.044	0.044	4.544	0.475
Skewness	2.062	0.673	-0.748	0.748	0.876	0.932
Kurtosis	8.306	3.913	3.675	3.675	3.132	5.933

Berdasarkan Tabel 3, rata-rata DDF, EFE, BO, dan BM relatif kecil dibandingkan HDI (73.114) dan IPEI (5.767). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja keuangan daerah penting, hasilnya tidak langsung terlihat pada indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Standar deviasi tertinggi ditemukan pada HDI (4.544), menunjukkan adanya variabilitas yang cukup besar antar wilayah. Skewness pada DDF menunjukkan distribusi yang miring ke kanan (positif), mengindikasikan bahwa sebagian besar data berada di rentang nilai yang lebih rendah.

3.2 Estimasi Regresi Data Panel

Untuk memastikan model yang digunakan sesuai, dilakukan serangkaian uji untuk memilih model terbaik, yakni Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), atau Random Effect Model (REM). Tabel 4 menyajikan hasil dan analisis dari setiap tahapan pemilihan model hingga penerapan model terbaik.

Tabel 4. Ringkasan Hasil Pemilihan Model

Model	Pengujian	F-statistic	Prob.	Keputusan Akhir
I. IPEI	Uji Chow	0.8883	0.6478	Common Effect lebih sesuai daripada Fixed Effect
	Uji Hausman	6.5105	0.2597	Random Effect lebih sesuai daripada Fixed Effect
	Uji LM	689.728	0.0042	Random Effect lebih sesuai daripada Common Effect
II. HDI	Uji Chow	0.6531	0.9285	Common Effect lebih sesuai daripada Fixed Effect
	Uji Hausman	1.9784	0.7397	Random Effect lebih sesuai daripada Fixed Effect
	Uji LM	689.728	0.0042	Random Effect lebih sesuai daripada Common Effect

Model terbaik untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap HDI adalah Random Effect Model (REM). Model ini dipilih berdasarkan hasil uji Hausman yang menunjukkan probabilitas signifikan pada tingkat kepercayaan 95%, sehingga mendukung penggunaan REM dibandingkan dengan Common Effect Model (CEM) maupun Fixed Effect Model (FEM). Gujarati & Porter (2009) menjelaskan bahwa model Random Effect lebih baik digunakan ketika variasi lintas lokasi signifikan namun tetap bersifat acak. Dalam konteks penelitian ini, hasil uji LM menguatkan keputusan untuk menggunakan model Random Effect sebagai model terbaik dalam analisis regresi data panel.

3.3 Uji Asumsi Klasik

Setelah menemukan model regresi terbaik, dilakukan uji asumsi klasik guna meminimalisir bias atas hasil penelitian. Pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji heteroskedasitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Tabel 5 menyajikan Hasil Uji Asumsi Klasik pada penelitian ini:

Tabel 5. Hasil Uji Asumsi Klasik

Model	Uji	Nilai	Kesimpulan
I. IPEI	Uji Normalitas	0.621	Normal
	Uji Heteroskedasitas	0.679	Homoskedasitas
	Uji Multikolinearitas	<0.1	Tidak Ada
	Uji Autokorelasi	1.9570	Tidak ada
II. HDI	Uji Normalitas	0.857	Normal
	Uji Heteroskedasitas T	0.123	Homoskedasitas
	Uji Multikolinearitas	<0.1	Tidak Ada
	Uji Autokorelasi	2.6796	Tidak Ada

3.4 Uji Hipotesis

Berikut adalah hasil uji t, uji f serta koefisien determinasi (R-squared) tiap model yang disajikan pada Tabel 6 dan Tabel 7 berikut:

3.4.1 Model IPEI



Tabel 6. Hasil Model Regresi IPEI

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.3817	0.9901	5.4356	0.0000
DDF	0.7866	0.1197	6.5697	0.0000
EFE	0.6427	0.0459	13.9927	0.0000
BO	0.7167	0.1296	5.5321	0.0000
BM	1.2385	0.1252	9.8909	0.0000
HDI	0.5003	0.0143	34.8913	0.0000
F-statistic	531,7729			
Prob(F-statistic)	0.0000			
Adjusted R-squared	0.9287			

Tabel 6 menyajikan hasil uji t untuk model IPEI menunjukkan bahwa setiap variabel independen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IPEI. HDI sebagai variabel mediasi juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap IPEI, dengan nilai t-statistik sebesar 34,5649 dan probabilitas sebesar 0,0000. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia merupakan faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, seperti yang dijelaskan oleh UNDP. Selanjutnya untuk nilai F-statistik sebesar 531,7729 dengan probabilitas 0,0000 menunjukkan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap IPEI. Selain itu terdapat analisis nilai R-squared sebesar 0,9287, yang berarti 92,87% variasi dalam IPEI dapat dijelaskan oleh DDF, EFE, BO, BM, dan HDI. Sisanya sebesar 7,13% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model ini. Nilai R-squared yang tinggi menunjukkan bahwa model ini memiliki kemampuan prediktif yang sangat baik. Dari keseluruhan hasil yang didapat maka disimpulkan bahwa kebijakan fiskal yang efektif dan fokus pada pembangunan manusia merupakan dua pilar utama dalam mendorong inklusi ekonomi di tingkat lokal dan nasional.

3.4.2 Model HDI

Tabel 7. Hasil Model Regresi HDI

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	68.5747	0.5631	121.7764	0.0000
DDF	2.4425	0.5576	4.38	0.0000
EFE	-1.6933	0.1899	-8.9159	0.0000
BO	4.595	0.5433	8.4568	0.0000
BM	1.7823	0.5971	2.9851	0.0032
F-statistic	46,3557			
Prob(F-statistic)	0.0000			
Adjusted R-squared	0.4749			

Tabel 7 menyajikan hasil uji t untuk model IPEI menunjukkan bahwa DDF, BO, dan BM menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap IPEI. Berbeda dengan EFE yang menunjukkan pengaruh negatif terhadap IPEI, hal ini dapat diartikan bahwa Efektivitas PAD yang tidak optimal mencerminkan ketidakefisienan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya lokal, yang pada akhirnya membatasi kemampuan untuk meningkatkan pembangunan manusia. Sedangkan nilai F-statistic sebesar 46,3557 dengan probabilitas 0,0000 menunjukkan bahwa model regresi ini signifikan secara keseluruhan. Hal ini berarti bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal (DDF), efektivitas PAD (EFE), belanja operasional (BO), dan belanja modal (BM) secara bersama-sama memengaruhi indeks pembangunan manusia (HDI). Sementara itu untuk Koefisien determinasi (R-squared) untuk model HDI sebesar 0,4749, menunjukkan bahwa 47,49% variasi dalam HDI dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam model, yaitu DDF, EFE, BO, dan BM. Sisanya sebesar 52,51% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model. Nilai R-squared ini mencerminkan bahwa meskipun variabel yang digunakan memiliki pengaruh signifikan, masih terdapat faktor eksternal yang memengaruhi pembangunan manusia.

3.5 Analisis Jalur (Path Analysis)

Human Development Index yang berperan sebagai variabel mediasi, memiliki pengaruh positif signifikan terhadap IPEI dengan nilai p-value sebesar 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan HDI secara langsung dapat mendorong pembangunan ekonomi inklusif. Secara tidak langsung, DDF, BO, dan BM menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap IPEI melalui HDI, dengan masing-masing nilai p-value sebesar 0.000, 0.000, dan 0.0032. Hasil ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia adalah jalur penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Namun, pengaruh EFE terhadap IPEI melalui HDI memiliki hubungan negatif signifikan, dengan nilai p-value sebesar 0.000, mengindikasikan perlunya pengelolaan PAD yang lebih efektif untuk mendukung sektor pembangunan manusia.

Keseluruhan hasil analisis jalur menegaskan bahwa HDI berperan signifikan sebagai mediasi antara variabel independen (DDF, EFE, BO, BM) dan IPEI. Pengaruh langsung dan tidak langsung dari DDF, BO, dan BM melalui



HDI memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi inklusif. Namun, efektivitas PAD (EFE) yang menunjukkan pengaruh negatif memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaannya agar dapat berkontribusi lebih baik pada HDI dan IPEI. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal yang efisien, alokasi belanja yang tepat, dan fokus pada peningkatan kualitas pembangunan manusia menjadi langkah strategis untuk mendorong ekonomi yang inklusif.

3.6 Pembahasan

3.6.1 Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal pada Pembangunan Manusia dan Inklusi Ekonomi

Derajat desentralisasi fiskal yang diukur melalui rasio kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Dalam penelitian ini, DDF memiliki koefisien sebesar 2.4425 ($p\text{-value} < 0.05$) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (HDI) dan 0.7866 ($p\text{-value} < 0.05$) terhadap Indeks Pertumbuhan Ekonomi Inklusif (IPEI). Temuan ini menunjukkan bahwa ketika daerah memiliki tingkat kemandirian fiskal yang lebih tinggi, mereka cenderung lebih mampu menyediakan layanan publik berkualitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Menurut Halim & Abdullah (2009), desentralisasi fiskal memberikan otonomi bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan mereka sesuai dengan kebutuhan spesifik. Ini memungkinkan daerah untuk mengalokasikan anggaran ke sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang merupakan faktor utama dalam peningkatan HDI. Penelitian Amalia & Purbadharmaja (2013) mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa daerah dengan tingkat desentralisasi fiskal yang lebih tinggi cenderung memiliki pembangunan manusia yang lebih baik karena adanya fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran.

Dalam konteks inklusi ekonomi, desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Prasetyantoko et al. (2012) menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terutama jika digunakan untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) yang berperan besar dalam perekonomian lokal. Dalam konteks Jawa Tengah, daerah dengan kemandirian fiskal tinggi seperti Kota Semarang dan Surakarta mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif.

3.6.2 Pengaruh Efektivitas PAD dan Perannya pada Pembangunan Manusia dan Inklusi Ekonomi

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (EFE) menunjukkan pengaruh yang beragam terhadap pembangunan manusia dan inklusi ekonomi. Dalam penelitian ini, EFE memiliki pengaruh negatif terhadap HDI dengan koefisien sebesar -1.6933 ($p\text{-value} < 0.05$) namun menunjukkan pengaruh positif terhadap IPEI dengan koefisien sebesar 0.6427 ($p\text{-value} < 0.05$). Hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas PAD dapat memiliki dampak yang berbeda tergantung pada bagaimana pendapatan tersebut digunakan.

Efektivitas PAD sering kali mencerminkan sejauh mana daerah dapat mengoptimalkan sumber daya lokal untuk meningkatkan pendapatan mereka. Namun, seperti yang dicatat oleh Azwandi et al. (2022), PAD yang tidak dikelola secara efektif cenderung lebih banyak digunakan untuk belanja rutin daripada belanja produktif. Hal ini dapat menjelaskan mengapa EFE memiliki pengaruh negatif terhadap HDI dalam penelitian ini. Ketika sebagian besar PAD digunakan untuk membiayai administrasi pemerintahan daripada investasi di sektor pendidikan atau kesehatan, dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat menjadi minim.

Sebaliknya, pengaruh positif EFE terhadap IPEI menunjukkan bahwa pengelolaan PAD yang efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif jika diarahkan pada program-program yang mendukung pengembangan sektor produktif. Penelitian Amalia & Purbadharmaja (2013) menemukan bahwa efektivitas PAD dapat meningkatkan inklusi ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja baru dan dukungan terhadap kegiatan ekonomi lokal. Dengan demikian, optimalisasi pengelolaan PAD menjadi penting untuk memastikan bahwa pendapatan asli daerah benar-benar digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi inklusif.

Tantangan utama dalam pengelolaan PAD Provinsi Jawa Tengah adalah rendahnya kapasitas pemerintah daerah dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan baru. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pendampingan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola PAD secara efektif. Dengan pengelolaan yang lebih baik, PAD dapat menjadi sumber daya yang penting untuk mendukung pembangunan manusia dan ekonomi yang inklusif.

3.6.3 Pengaruh Harmonisasi Belanja Daerah pada Pembangunan Manusia dan Inklusi Ekonomi

Harmonisasi belanja daerah, yang mencakup belanja modal (BM) dan belanja operasional (BO), memiliki pengaruh yang signifikan terhadap HDI dan IPEI. Dalam penelitian ini, BM memiliki koefisien sebesar 1.7823 ($p\text{-value} = 0.0032$) terhadap HDI dan 1.2385 ($p\text{-value} < 0.05$) terhadap IPEI, sementara BO memiliki koefisien sebesar 4.5950 ($p\text{-value} < 0.05$) terhadap HDI dan 0.7167 ($p\text{-value} < 0.05$) terhadap IPEI. Hasil ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara belanja modal dan operasional diperlukan untuk menciptakan dampak yang maksimal pada pembangunan manusia dan ekonomi.

Belanja modal berkontribusi langsung pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan sekolah, yang menjadi fondasi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penelitian Safitri (2021) menunjukkan bahwa investasi dalam belanja modal memiliki dampak jangka panjang terhadap HDI, terutama melalui peningkatan



akses pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain, belanja operasional memastikan bahwa infrastruktur yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Sejalan dengan Jaeni & Anggana L (2016) menjelaskan bahwa adanya peningkatan belanja modal dapat memperkuat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di wilayah tersebut.

Dalam konteks inklusi ekonomi, belanja modal menciptakan peluang ekonomi baru dengan membuka akses ke pasar dan meningkatkan produktivitas. Sementara itu, belanja operasional mendukung keberlanjutan kegiatan ekonomi dengan menyediakan layanan publik yang memadai. Penelitian oleh Rahman (2019) menunjukkan bahwa harmonisasi antara belanja modal dan operasional adalah kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, tantangan utama dalam harmonisasi belanja daerah adalah alokasi anggaran yang sering kali tidak merata antara sektor modal dan operasional. Sebagai contoh, beberapa daerah di Jawa Tengah cenderung mengalokasikan sebagian besar anggaran mereka untuk belanja operasional, yang dapat menghambat pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan anggaran yang lebih seimbang untuk memastikan bahwa belanja modal dan operasional dapat saling mendukung dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong inklusi ekonomi

3.6.4 Human Development Index sebagai Variabel Mediasi

Human Development Index (HDI) memiliki peran penting sebagai variabel mediasi antara kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Dalam penelitian ini, HDI memiliki koefisien sebesar 0.5003 (p -value < 0.05) terhadap IPEI, menunjukkan bahwa peningkatan HDI secara signifikan mendorong inklusi ekonomi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Klasen (2010), yang menyatakan bahwa pembangunan manusia adalah inti dari strategi pertumbuhan ekonomi inklusif. Sebagai variabel mediasi, HDI menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah tidak hanya memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung tetapi juga melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, derajat desentralisasi fiskal, efektivitas PAD, dan harmonisasi belanja daerah berkontribusi pada peningkatan HDI, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Penelitian oleh Prasetyantoko et al. (2012) menekankan bahwa investasi dalam pembangunan manusia adalah langkah penting untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

Dalam konteks Jawa Tengah, peningkatan HDI menjadi salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Bappenas, 2020). Dengan meningkatkan akses masyarakat ke pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang layak, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif untuk pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, upaya peningkatan HDI harus menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menekankan pentingnya investasi dalam pembangunan manusia sebagai alat untuk mendorong inklusi ekonomi. Dengan mengintegrasikan temuan ini ke dalam kebijakan pembangunan daerah, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. KESIMPULAN

Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data panel, penelitian ini mengidentifikasi bagaimana rasio derajat desentralisasi fiskal (DDF), efektivitas Pendapatan Asli Daerah (EFE), serta harmonisasi belanja modal (BM) dan belanja operasional (BO) memengaruhi HDI secara langsung, serta bagaimana HDI sebagai variabel mediasi turut memengaruhi IPEI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan inklusif dan indeks pembangunan manusia. Daerah yang memiliki tingkat kemandirian fiskal lebih tinggi, cenderung lebih mampu menyediakan layanan publik berkualitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sedangkan untuk Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (EFE) menunjukkan pengaruh yang beragam terhadap pembangunan manusia dan inklusi ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa efektivitas PAD dapat memiliki dampak yang berbeda tergantung pada bagaimana pendapatan tersebut digunakan. Ketika sebagian besar PAD digunakan untuk membiayai administrasi pemerintahan daripada investasi di sektor pendidikan atau kesehatan, dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat menjadi minim. Hal ini dapat menjelaskan mengapa EFE memiliki pengaruh negatif terhadap HDI dalam penelitian ini. Sebaliknya, pengaruh positif EFE terhadap IPEI menunjukkan bahwa pengelolaan PAD yang efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif jika diarahkan pada program-program yang mendukung pengembangan sektor produktif. Harmonisasi belanja daerah, yang mencakup belanja modal (BM) dan belanja operasional (BO), memiliki pengaruh yang signifikan terhadap HDI dan IPEI. Hasil ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara belanja modal dan operasional diperlukan untuk menciptakan dampak yang mendukung dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong inklusi ekonomi. Human Development Index (HDI) memiliki peran penting sebagai variabel mediasi antara kinerja keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menekankan pentingnya investasi dalam pembangunan manusia sebagai alat untuk mendorong inklusi ekonomi. Dengan mengintegrasikan temuan ini ke dalam kebijakan pembangunan daerah, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Saran untuk penelitian selanjutnya agar bisa mengembangkan variabel lain yang mempengaruhi IPEI dan HDI agar dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan relevan. Agar menciptakan inklusi ekonomi dan kualitas hidup



masyarakat yang baik, pemerintah perlu sinergi dalam mengoptimalkan pembangunan fisik dan juga meningkatkan sumber daya manusia. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif akan menunjang kemakmuran masyarakat.

REFERENCES

- Abdulaziz, N. siswo. (2020). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1 No.8(Januari 2021), 1575–1580. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i8.309>
- Adi, A. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021. Universitas Gadjah Mada.
- Arsa, I. K., & Setiawina, N. D. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan pada Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/kota Se-provinsi Bali Tahun 2006 S.d. 2013. *Buletin Studi Ekonomi*, 20 No. 2.
- Arsyad, L. (2017). Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ESPA4324-M1.pdf>
- Astuti, W. (2015). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Pengangguran Dan Kemiskinan (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Pulau Jawa Periode 2007-2011). *LP3M STIEBBANK*, 6 No. 1, 1–18.
- Azwandi, A., Wibisono, C., Gita Indrawan, M., Satriawan, B., & Khaddafi, M. (2022). The Effect Of Financial Performance On The Human Development Index Moderated Economic Growth In Regency/City In The Province Of Riau Island. *International Journal of Educational Review, Law and Social Sciences (IJERLAS)*, 2(5), 633–650. <https://doi.org/10.54443/ijerlas.v2i5.371>
- Bappenas. (2018). Ekonomi Inklusif. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. <https://inkluf.bappenas.go.id/indeks>
- Bappenas. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Bappenas Website. <https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/1037>
- BPS. (2016). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Daerah Istimewa Yogyakarta 2011-2015. Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- BPS. (2024). Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Triwulan IV-2023. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- Dali, N., Akib, M., & Haisa, W. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 6(1). <https://doi.org/10.33772/jak-uho.v6i1.19500>
- DJPb Jateng. (2023). Kajian Fiskal Regional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023. Semarang. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah.
- Gousario, F., & Dharmastuti, C. F. (2015). Regional Financial Performance and Human Development Index Based on Study In 20 Counties/Cities of Level I Region. *The Winners*, 16(2), 152. <https://doi.org/10.21512/tw.v16i2.1568>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5. ed., intern. ed., [Nachdr.]). McGraw-Hill.
- Halim, A., & Abdullah, S. (2009, Oktober). Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah: (Sebuah Peluang Penelitian Anggaran dan Akuntansi) [WordPress]. Kelembagaan DAS. <https://kelebagaandas.wordpress.com/teori-agensi-principal-agent-theory/abdul-halim-dan-syukriy-abdullah/>
- Hapsari, W. R. (2019). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 3(1), 11. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v3i1.121>
- Humas Jateng. (2024). Jateng Terbaik Pertama Penghargaan Pembangunan Daerah Bappenas. <https://jatengprov.go.id/publik/jateng-terbaik-pertama-penghargaan-pembangunan-daerah-bappenas/>
- Ihwardi, L. R., & Khoirunurofik, K. (2023). Regional Financial Performance and Inclusive Economic Development: Empirical Evidence from Provinces in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 15(2), 417–429. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.417-429>
- Jaeni, & Anggana L, G. (2016). Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *Proceeding SENDI_U*. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendu/article/view/4257>
- Kuncorowati, R. (2022). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pendidikan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mahmudi. (2016). *Buku Akuntansi Sektor Publik*. UII Press Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. ANDI.
- Masduki, Umam, Moch. F. S., & Prihartini, E. (2020). Sosialisasi Dan Edukasi Pengelolaan Keuangan Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Desa Gandu Kecamatan Dawuan. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 583–588. <https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.444>
- Mahi, B. R. (2019). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Volatilitas Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 19(1), 118–138. <https://doi.org/10.21002/jepi.2019.07>
- Patarai, M. I. (2018). *Kinerja Keuangan Daerah* (2nd ed.). De La Macca.
- Prasetyia, F. (2021). Kualitas Pemerintahan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Jawa Timur. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 5(1), 21–34. <https://doi.org/10.31685/kek.v5i1.581>
- Purnamawati, A., & Hudaya, J. B. (2020). The Effects of Regional Financial Ratios on Human Development Index (An Empirical Study in All Districts / Cities in Central Java Province During 2012–2017). *Proceedings of the 8th International Conference on Entrepreneurship and Business Management (ICEBM 2019) UNTAR*. 8th International Conference of Entrepreneurship and Business Management Untar (ICEBM 2019), Kuala Lumpur, Malaysia. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200626.072>
- Riduwan, & Kuncoro, E. A. (2017). Cara Menggunakan Dan Memakai Path Analysis (Analisis Jalur). Alfabeta.
- Safitri, M. I. D. (2021). Analisis Dampak Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Jawa Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 85–96. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.339>
- Sari, G. N., Kindangen, P., & Rotinsulu, T. O. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan Di Sulawesi Utara Tahun 2004 – 2014. *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 18(2). <https://doi.org/10.35794/jpekd.12789.18.2.2016>



- Sinaga, M., Zalukhu, R., Collyn, D., & Hutauruk, R. (2023). Pengaruh PAD, dana perimbangan, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di kepulauan Nias: Mediasi belanja modal. *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(2), 1070–1081.
- Siregar, A. O., & Mariana, I. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan. *Journal IMAGE*, 9 Nomor 1, 1–19. <https://doi.org/10.17509/image.v9i1.23998>
- Suryaningrum, D. A., Zulfikri, A., & Elisabeth, C. R. (2023). Peran Inklusi Keuangan dalam Pembangunan Ekonomi: Bukti dari Negara-Negara Berkembang. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 1(3), 246–259.
- Syamsudin, Cahya, B. T., & Dewi, S. N. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Kemiskinan. *DAYA SAING Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, Vol. 17, No. 1, 15–27.
- UNDP. (2020). Explore HDI. United Nations Development Programme. <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI>
- Utariifa, S. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Human Development Index Jawa Tengah Tahun 2018-2021. Universitas Islam Indonesia.
- Wahyu, A., & Pangaribowo, E. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2019. Universitas Gadjah Mada.
- Widiyanto, P. P., & Isnowati, S. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *S E I K O: Journal of Management & Business*, 6(2), 239–249.
- World Bank. (2018). Financial Inclusion is a Key to Reducing Poverty and Boosting Prosperity. Wolbank.org/en/topic/financialinclusion/overview.
- Wahyu, A., & Pangaribowo, E. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2019. Universitas Gadjah Mada.
- Widiyanto, P. P., & Isnowati, S. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *S E I K O: Journal of Management & Business*, 6(2), 239–249.
- World Bank. (2018). Financial Inclusion is a Key to Reducing Poverty and Boosting Prosperity. Wolbank.org/en/topic/financialinclusion/overview.